

KATA PENGANTAR

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan instrument pembinaan, pengendalian dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Negara sehingga hak dan wewenang daerah dalam mengelola otonomi tetap sejalan dengan cita-cita Pembangunan Nasional dengan berpijak pada kepentingan nasional dimaksud. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan norma perekat hubungan hirarkis antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah sehingga kedudukan dan peranan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi sangat penting dan menjadi salah satu kewajiban Kepala Daerah untuk dilaksanakan setiap Tahun Anggaran.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini disusun sebagai bahan evaluasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian bagi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, sekaligus merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pemerintah dalam melaksanakan berbagai urusan yang menjadi kewenangan dan ketugasan Pemerintah Daerah.

Ba'a, 24 Januari 2025
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Rote Ndao,



Regina A. V. Kedoh, S.STP,M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19800827 199912 2 003

I. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam urusan Pemerintahan yang digunakan antara lain :

- a. Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada Asas Umum Pengelolaan Keuangan yang tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku secara efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan Asas Keadilan dan Kepatutan;
- b. APBD merupakan Dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dan jumlah yang dianggarkan dalam APBD merupakan Batas Tertinggi untuk setiap Jenis Belanja;
- c. Semua Transaksi Keuangan Daerah baik Penerimaan Daerah maupun Pengeluaran Daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah;
- d. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah;
- e. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran dari Rekening Kas Daerah;
- f. Khusus Pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai Fungsi Perbendaharaan;
- g. Belanja Langsung adalah Belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dibagi menurut Jenis Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal.

A. URUSAN WAJIB YANG DI LAKSANAKAN

1. Pelaksanaan Program Kegiatan dan Hasil Pelaksanaannya

a. Program

Pelaksanaan Program Tahun 2024 meliputi 8 (delapan) Program yaitu :

1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota
2. Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
3. Perlindungan Perempuan
4. Peningkatan Kualitas Keluarga
5. Perlindungan Khusus Anak
6. Pengendalian Penduduk

7. Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
8. Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

b. Kegiatan

Untuk merealisasikan 8 (delapan) Program sebagaimana tersebut diatas, maka dijabarkan lebih lanjut dalam 21 (dua puluh satu) kegiatan yaitu :

- 1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- 2) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah.
- 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- 5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- 6) Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota.
- 7) Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota.
- 8) Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.
- 9) Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan kabupaten/Kota.
- 10) Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- 11) Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Yang Wilayah Kerjanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota.

- 12) Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.
- 13) Kegiatan Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- 14) Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- 15) Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.
- 16) Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal.
- 17) Kegiatan Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/Petugas lapangan KB (PKB/PLKB)
- 18) Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
- 19) Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB.
- 20) Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- 21) Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Alokasi dan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Belanja Daerah merupakan pengalokasian dan pendistribusian semua pengeluaran daerah dalam periode tahun anggaran tertentu. Kebijakan alokasi belanja sudah didasarkan pada Prioritas

Program/Kegiatan dengan pengendalian yang lebih baik dalam perencanaan dan pelaksanaannya untuk tercapainya pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien.

Untuk menunjang pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 mendapat Pagu Anggaran sebesar **Rp. 9.056.383.654,-** dan seiring berjalan terdapat perubahan/penambahan anggaran yakni menjadi **Rp. 9.975.616.849,-** dengan Realisasi Belanja sebesar **Rp. 8.069.689.129,-** atau **81,71%** sedangkan sisa yang tidak terealisasi sebesar **Rp 1.905.927.720,-** dengan perincian sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota.

Pagu Anggaran sebesar Rp.2.733.817.154,- dengan Realisasi Belanja sebesar Rp.2.388.690.222,- atau presentase penyerapan anggaran mencapai 87,38%; sedangkan sisa yang tidak terealisasi sebesar Rp. 345.126.932,- dengan perincian sebagai berikut :

1) *Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.856.700.700,- dengan Realisasi Belanja sebesar Rp. 1.803.777.411,- atau presentase penyerapan mencapai 97,15%.

- *Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*

Pagu Anggaran sebesar Rp. 2.258.979.054,- dan Realisasi Belanja sebesar Rp. 1.978.011.972,- atau presentase penyerapan mencapai 87,56%. Sisa Pagu sebesar Rp. 280.967.082,-

- *Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD*

Pagu Anggaran sebesar Rp. 102.000.000,- dan Realisasi Belanja sebesar Rp. 85.380.000,- atau presentase penyerapan mencapai 83,71%. Sisa Pagu sebesar Rp. 16.620.000,-

2) *Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah*

Pagu Anggaran sebesar Rp. 9.600.000,- dan Realisasi Belanja sebesar Rp. 9.600.000,- atau presentase penyerapan mencapai 100%.

- *Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD*

Pagu Anggaran sebesar Rp. 9.600.000,- dan Realisasi Belanja sebesar Rp. 9.600.000,- atau presentase penyerapan mencapai 100%.

3) *Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*

Pagu Anggaran sebesar Rp. 154.325.600,- dan Realisasi Belanja sebesar Rp. 152.205.850,- atau presentase penyerapan mencapai 98,63%. Sisa Pagu sebesar Rp. 2.119.750,-

- *Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*

Pagu Anggaran sebesar Rp. 4.995.000,- dan Realisasi Belanja sebesar Rp. 3.445.000,- atau presentase penyerapan mencapai 66,17%. Sisa Pagu sebesar Rp. 1.540.000,-

- *Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor*

Pagu Anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- dan Realisasi Belanja sebesar Rp. 30.000.000,- atau presentase penyerapan mencapai 100%.

- *Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan*

Pagu Anggaran sebesar Rp. 19.296.600,- dan Realisasi Belanja sebesar Rp. 19.198.450,- atau presentase penyerapan mencapai 99,49%. Sisa Pagu sebesar Rp. 98.150,-

- *Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*

Pagu Anggaran sebesar Rp. 100.034.000,- dan Realisasi Belanja sebesar Rp. 99.552.400,- atau presentase penyerapan mencapai 99,52%. Sisa Pagu sebesar Rp. 481.600,-

4) *Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

Pagu Anggaran sebesar Rp. 35.474.500,- dan Realisasi Belanja sebesar Rp. 26.736.800,- atau presentase penyerapan mencapai 75,37%. Sisa pagu sebesar Rp. 8.737.700,-

- *Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*

Pagu Anggaran sebesar Rp. 975.000,- dan Realisasi Belanja sebesar Rp. 975.000,- atau presentase penyerapan mencapai 100%.

- *Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*

Pagu Anggaran sebesar Rp. 34.499.500,- dan Realisasi Belanja sebesar Rp. 25.761.800,- atau presentase penyerapan mencapai 74,67%. Sisa Pagu sebesar Rp. 8.737.700,-

5) *Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

Pagu Anggaran sebesar Rp. 173.438.000,- dan Realisasi Belanja sebesar Rp. 136.755.600,- atau presentase penyerapan mencapai 78,85%. Sisa pagu sebesar Rp. 36.682.400,-

- *Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*

Pagu Anggaran sebesar Rp. 173.438.000,- dan Realisasi Belanja sebesar Rp. 136.755.600,- atau presentase penyerapan mencapai 78,85%. Sisa Pagu sebesar Rp. 36.682.400,-

b. Program Perarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

Pagu Anggaran sebesar Rp. 40.199.000,- dengan Realisasi Belanja sebesar Rp. 36.034.500,- atau presentase penyerapan anggaran mencapai 89,64%; sedangkan sisa yang tidak terealisasi sebesar Rp. 4.164.500,- dengan perincian sebagai berikut :

1) *Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/kota*

Pagu Anggaran sebesar Rp.20.000.000,- dan Realisasi Belanja sebesar Rp. 20.000.000,- atau presentase penyerapan mencapai 100%.

- *Sub Kegiatan Sosialisasi Partispasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi*

Pagu Anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- mengalami dan Realisasi Belanja sebesar Rp. 20.000.000,- atau presentase penyerapan mencapai 100%.

2) *Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/kota.*

Pagu Anggaran sebesar Rp. 20.199.000,- dan Realisasi Belanja sebesar Rp. 16.034.500,- atau presentase penyerapan mencapai 79,38%. Sisa Pagu sebesar Rp. 4.164.500,-

- *Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota*

Pagu Anggaran sebesar Rp. 20.199.000,- dan Realisasi Belanja sebesar Rp. 16.034.500,- atau presentase penyerapan mencapai 79,38%. Sisa Pagu Anggaran Rp 4.164.500,-

c. Program Perlindungan Perempuan.

Pagu Anggaran sebesar Rp. 305.000.000,- dengan Realisasi Belanja sebesar Rp. 252.763.675,- atau presentase penyerapan anggaran mencapai 82,00%; sedangkan sisa yang tidak terealisasi sebesar Rp. 52.236.325,- dengan perincian sebagai berikut :

1) *Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/kota*

Pagu Anggaran sebesar Rp. 65.000.000,- dan Realisasi Belanja sebesar Rp. 60.440.675,- atau presentase penyerapan mencapai 92,98%. Sisa Pagu Anggaran Rp 4.560.000,-

- *Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota*

Pagu Anggaran sebesar Rp. 65.000.000,- dan Realisasi Belanja sebesar Rp. 60.440.000,- atau presentase penyerapan mencapai 92,98%. Sisa Pagu Anggaran Rp. 4.560.000,-

2) *Kegiatan Penyedia Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/kota.*

Pagu Anggaran sebesar Rp. 188.360.000,- dan Realisasi Belanja sebesar Rp. 140.709.675,- atau presentase penyerapan mencapai 74,70%. Sisa Pagu Anggaran Rp. 47.650.325,-

- *Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyedia Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota*

Pagu Anggaran sebesar Rp. 188.360.000,- dan Realisasi Belanja sebesar Rp. 140.709.675,- atau presentase penyerapan mencapai 74,70%. Sisa Pagu Anggaran Rp. 47.650.325,-

3) *Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/kota.*

Pagu Anggaran sebesar Rp. 51.640.000,- dan Realisasi Belanja sebesar Rp. 51,614,000,- atau presentase penyerapan mencapai 99,95%. Sisa Pagu Anggaran Rp. 26.000,-

- *Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota*

Pagu Anggaran sebesar Rp. 51.640.000,- dan Realisasi Belanja sebesar Rp. 51,614,000,- atau presentase penyerapan mencapai 99,95%. Sisa Pagu Anggaran Rp. 26.000,-

d. *Program Peningkatan Kualitas Keluarga*

Pagu Anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- dengan Realisasi Belanja sebesar Rp. 17.407.000,- atau presentase penyerapan anggaran mencapai 87,04%; sedangkan sisa yang tidak terealisasi sebesar Rp. 2.593.000,- dengan perincian sebagai berikut :

4) *Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota.*

Pagu Anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- dan Realisasi Belanja sebesar Rp. 17.407.000,- atau presentase penyerapan mencapai 87,04%. Sisa Pagu Anggaran Rp. 2.593.000,-

- *Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*

Pagu Anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- dan Realisasi Belanja sebesar Rp. 17.407.000,- atau presentase penyerapan mencapai 87,04%. Sisa pagu sebesar Rp. 2.593.000,-

e. Program Perlindungan Khusus Anak

Pagu Anggaran sebesar Rp. 373.928.000,- dengan Realisasi Belanja sebesar Rp. 365.411.000,- atau presentase penyerapan anggaran mencapai 97,72%; sedangkan sisa yang tidak terealisasi sebesar Rp. 8.517.000,- dengan perincian sebagai berikut :

1) *Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota*

Pagu Anggaran sebesar Rp. 158.728.000,- dan Realisasi Belanja sebesar Rp. 151.416.000,- atau presentase penyerapan mencapai 95,39%. Sisa pagu sebesar Rp. 7.312.000,-

- *Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota*

Pagu Anggaran sebesar Rp. 65.000.000,- dan Realisasi Belanja sebesar Rp. 59.782.500,- atau presentase penyerapan mencapai 91,97%. Sisa pagu sebesar Rp. 5.217.500,-

- *Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Kewenangan Kabupaten/Kota*

Pagu Anggaran sebesar Rp. 93.728.000,- dan Realisasi Belanja sebesar Rp. 91.633.500,- atau presentase penyerapan mencapai 97,77%. Sisa pagu sebesar Rp. 2.094.500,-

2) *Kegiatan Penyediaan Layanan Bagi anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota*

Pagu Anggaran sebesar Rp. 150.800.000,- dan Realisasi Belanja sebesar Rp. 149.721.000,- atau presentase penyerapan mencapai 99,28%. Sisa pagu sebesar Rp. 1.079.000,-

- *Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK*

Pagu Anggaran sebesar Rp. 150.800.000,- dan Realisasi Belanja sebesar Rp. 149.721.000,- atau presentase penyerapan mencapai 99,28%. Sisa pagu sebesar Rp. 1.079.000,-

3) *Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota*

Pagu Anggaran sebesar Rp. 64.400.000,- dan Realisasi Belanja sebesar Rp. 64.274.000,- atau presentase penyerapan mencapai 99,80%. Sisa pagu sebesar Rp. 126.000,-

- *Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan Bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota*

Pagu Anggaran sebesar Rp. 64.400.000,- dan Realisasi Belanja sebesar Rp. 64.274.000,- atau presentase penyerapan mencapai 99,80%. Sisa pagu sebesar Rp. 126.000,-

f. Program Pengendalian Penduduk

Pagu Anggaran sebesar Rp. 289.399.900,- dengan Realisasi Belanja sebesar Rp. 244.989.800,- atau presentase penyerapan anggaran mencapai 84,65%; sedangkan sisa yang tidak terealisasi sebesar Rp. 44.410.100,- dengan perincian sebagai berikut :

1) *Kegiatan* Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk

Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Pagu Anggaran sebesar Rp. 289.399.900,- dan Realisasi Belanja sebesar Rp. 244.989.800,- atau presentase penyerapan mencapai 84,65%. Sisa pagu sebesar Rp. 44.410.100,-

- *Sub Kegiatan* Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga

Pagu Anggaran sebesar Rp. 60.000.000,- dan Realisasi Belanja sebesar Rp. 59.855.000,- atau presentase penyerapan mencapai 99,76%. Sisa Pagu Anggaran Rp. 145.000,-

- *Sub Kegiatan* Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga

Pagu Anggaran sebesar Rp. 89.400.000,- dan Realisasi Belanja sebesar Rp. 80.880.000,- atau presentase penyerapan mencapai 90,47%. Sisa Pagu Anggaran Rp. 8.520.000,-

- *Sub Kegiatan* Pengelolaan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan Dan Layanan KB

Pagu Anggaran sebesar Rp. 139.999.900,- dan Realisasi Belanja sebesar Rp. 104.254.800,- atau presentase penyerapan mencapai 74,47%. Sisa Pagu Anggaran Rp. 35.745.100,-

g. Program Pembinaan Keluarga Berencana

Pagu Anggaran sebesar Rp. 4.938.179.800,- dengan Realisasi Belanja sebesar Rp. 3.645.876.552,- atau presentase penyerapan anggaran mencapai 73,83%; sedangkan sisa yang tidak terealisasi sebesar Rp. 1.292.303.248,- dengan perincian sebagai berikut :

2) *Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal*

Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.102.468.800,- dan Realisasi Belanja sebesar Rp. 644.064.052,- atau presentase penyerapan mencapai 58,42%. Sisa pagu sebesar Rp. 458.404.704,-

- *Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK*

Pagu Anggaran sebesar Rp. 80.000.000,- dan Realisasi Belanja sebesar Rp. 48.275.000,- atau presentase penyerapan mencapai 60,34%. Sisa Pagu Anggaran Rp. 31.725.000,-

- *Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan sarana di balai Penyuluhan Bangsa Kencana*

Pagu Anggaran sebesar Rp. 496.000.000,- dan Realisasi Belanja sebesar Rp. 254.139.146,- atau presentase penyerapan mencapai 51,24%. Sisa Pagu Anggaran Rp. 241.860.854,-

- *Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)*

Pagu Anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- dan Realisasi Belanja sebesar Rp. 123.821.500,- atau presentase penyerapan mencapai 82,55%. Sisa Pagu Anggaran Rp. 26.178.500,-

- *Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program Bangga Kencana* melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang

Pagu Anggaran sebesar Rp. 128.500.100,- dan Realisasi Belanja sebesar Rp. 117.635.100,- atau presentase penyerapan mencapai 91,54%. Sisa Pagu Anggaran Rp. 10.865.000,-

- *Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana* sesuai Kearifan Budaya Lokal
Pagu Anggaran sebesar Rp. 21.500.000,- dan Realisasi Belanja sebesar Rp. 0,- atau presentase penyerapan mencapai 0%. Sisa Pagu Anggaran Rp. 21.500.000,-

- *Sub Kegiatan Advokasi Program Bangga Kencana* oleh Pokja Advokasi Stakeholders dan Mitra Kerja

Pagu Anggaran sebesar Rp. 226.468.700,- dan Realisasi Belanja sebesar Rp. 100.193.306,- atau presentase penyerapan mencapai 44,24%. Sisa Pagu Anggaran Rp. 126.275.394,-

3) *Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)*

Pagu Anggaran sebesar Rp. 886.975.000,- dengan Realisasi Belanja sebesar Rp. 871.195.500,- atau presentase penyerapan anggaran mencapai 98,22%; sedangkan sisa yang tidak terealisasi sebesar Rp. 15.779.500,- dengan perincian sebagai berikut :

- *Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)*

Pagu Anggaran sebesar Rp. 387.000.000,- dan Realisasi Belanja sebesar Rp. 383.825.800,- atau presentase penyerapan mencapai 99,18%. Sisa Pagu Anggaran Rp. 3.174.200,-

- *Sub Kegiatan* Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh

Pagu Anggaran sebesar Rp. 499.975.000,- dan Realisasi Belanja sebesar Rp. 487.369.700,- atau presentase penyerapan mencapai 97,48%. Sisa Pagu Anggaran Rp. 12.605.300,-

1) *Kegiatan Pengendalian Alat dan obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya*

Pagu Anggaran sebesar Rp. 2.042.236.000,- dengan Realisasi Belanja sebesar Rp. 1.304.864.200,- atau presentase penyerapan anggaran mencapai 63,89%; sedangkan sisa yang tidak terealisasi sebesar Rp. 737.371.800,- dengan perincian sebagai berikut :

- *Sub Kegiatan* Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya

Pagu Anggaran sebesar Rp. 13.500.000,- dan Realisasi Belanja sebesar Rp. 11.459.000,- atau presentase penyerapan mencapai 84,88%. Sisa Pagu Anggaran Rp. 2.041.000,-

- *Sub Kegiatan* Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.055.266.000,- dan Realisasi Belanja sebesar Rp. 533.146.200,- atau presentase penyerapan mencapai 50,52%. Sisa Pagu Anggaran Rp. 522.199.800,-

- *Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB*

Pagu Anggaran sebesar Rp. 541.198.000,- dan Realisasi Belanja sebesar Rp. 515.193.000,- atau presentase penyerapan mencapai 95,19%. Sisa Pagu Anggaran Rp. 26.005.000,-

- *Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatannya Termasuk Jaringan dan Jejaringannya*

Pagu Anggaran sebesar Rp. 15.800.000,- dan Realisasi Belanja sebesar Rp. 4.200.000,- atau presentase penyerapan mencapai 26,58%. Sisa Pagu Anggaran Rp. 11.600.000,-

- *Sub Kegiatan Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan*

Pagu Anggaran sebesar Rp. 416.472.000,- dan Realisasi Belanja sebesar Rp. 240.866.000,- atau presentase penyerapan mencapai 92,65%. Sisa Pagu Anggaran Rp. 175.606.000,-

2) *Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB*

Pagu Anggaran sebesar Rp. 906.500.000,- dengan Realisasi Belanja sebesar Rp. 825.752.800,- atau presentase penyerapan anggaran mencapai 47,54%; sedangkan sisa yang tidak terealisasi sebesar Rp. 80.747.200,- dengan perincian sebagai berikut :

- *Sub Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB*

Pagu Anggaran sebesar Rp. 4.136.900.500,- dan Realisasi Belanja sebesar Rp. 1.821.672.700,- atau presentase penyerapan mencapai 44,03%. Sisa Pagu Anggaran Rp. 2.315.227.800,-

- *Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB*

Pagu Anggaran sebesar Rp. 456.500.000,- dan Realisasi Belanja sebesar Rp. 432.713.500,- atau presentase penyerapan mencapai 94,79%. Sisa Pagu Anggaran Rp. 23.786.500,-

h. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.175.092.995,- dengan Realisasi Belanja sebesar Rp. 1.118.516.380,- atau presentase penyerapan anggaran mencapai 95,19%; sedangkan sisa yang tidak terealisasi sebesar Rp. 56.576.615,- dengan perincian sebagai berikut :

1) *Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.*

Pagu Anggaran sebesar Rp. 336.547.995,- dan Realisasi Belanja sebesar Rp. 321.080.792,- atau presentase penyerapan mencapai 95,40%. Sisa Pagu Sebesar Rp. 15.467.000,-

- *Sub Kegiatan Pengelolaan Ketahanan Keluarga melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)*

Pagu Anggaran sebesar Rp. 9.600.000,- dan Realisasi Belanja sebesar Rp. 0,- atau presentase penyerapan mencapai 0%. Sisa Pagu Sebesar Rp. 9.600.000,-

- *Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,*

BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)

Pagu Anggaran sebesar Rp. 326.947.995,- dan Realisasi Belanja sebesar Rp. 321.080.792,- atau presentase penyerapan mencapai 98,21%. Sisa Pagu Sebesar Rp. 5.867.203,-

2) *Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.*

Pagu Anggaran sebesar Rp. 838.545.995,- dan Realisasi Belanja sebesar Rp. 797.435.588,- atau presentase penyerapan mencapai 95,10%. Sisa Pagu Sebesar Rp. 41.109.412,-

- *Sub Kegiatan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)*

Pagu Anggaran sebesar Rp. 377.600.000,- dan Realisasi Belanja sebesar Rp. 371.664.088,- atau presentase penyerapan mencapai 98,58%. Sisa Pagu Sebesar Rp. 5.335.912,-

- *Sub Kegiatan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)*

Pagu Anggaran sebesar Rp. 461.545.000,- dan Realisasi Belanja sebesar Rp. 425.771.500,- atau presentase penyerapan mencapai 92,25%. Sisa Pagu Sebesar Rp. 35.773.500,-

2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao dalam Tahun Anggaran 2024 belum memiliki Standar Pelayanan Minimal sebagai acuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Program dan Kegiatan untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. Namun dilihat dari Tingkat Capaian Kinerja Program dan Kegiatan yang mencapai 81,71%, maka dapat dinyatakan bahwa Tingkat Pencapaian SPM adalah 81,71% dengan kategori *Baik*.

3. OPD Penyelenggara Urusan Wajib

Organisasi Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Urusan Wajib adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao.

4. Jumlah Aparatur Penyelenggara Urusan Wajib

Jumlah Aparatur penyelenggara Urusan Wajib pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Rote Ndao sebanyak 25 (dua puluh lima) orang.

6. Proses Perencanaan Pembangunan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao dibuat dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 – 2026 dengan berdasarkan pada potensi sumberdaya yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao.

Merujuk pada potensi sumberdaya dimaksud, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao menuangkan dalam sejumlah program baik rutin maupun publik, yaitu :

a. Program Rutin

Program Penunjang Urusan Pemerintahan

b. Program Publik

- 1) Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
- 2) Program Perlindungan Perempuan
- 3) Program Peningkatan Kualitas Keluarga
- 4) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
- 5) Program Perlindungan Khusus Anak
- 6) Program Pengendalian Penduduk
- 7) Program Pembinaan Keluarga Berencana
- 8) Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

7. Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao, berasal dari Anggaran DAU/APBD Kabupaten Rote Ndao dan DAK dari BKKBN Pusat, yang datanya data disajikan sebagai berikut :

1. 1 (satu) Unit Toyota Avansa
2. 3 (tiga) Mobil Izuzu
3. 1 (satu) Mobil Mitsubishi Strada
4. 1 (satu) Mobil Daihatsu
5. 1 (satu) Honda Supra Fit
6. 10 (Sepuluh) Honda Supra 125
7. 20 (dua puluh) Unit Yamaha MX King 150 CC
8. 15 (lima belas) Unit Motor Honda Vario 150 CC
9. 53 (lima puluh tiga) Buah Meja $\frac{1}{2}$ Biro
10. 38 (tiga puluh Delapan) Buah Lemari 2 pintu
11. 4 (empat) Unit Fiber Air

- 12. 1 (satu) Buah Karpas
- 13. 10 (sepuluh) Unit AC
- 14. 34 (tiga puluh empat) Buah Kipas Angin
- 15. 3 (tiga) Buah Papan Nama Kantor
- 16. 21 (Dua Puluh Satu) Unit Printer
- 17. 66 (enam puluh enam) Buah Kursi Lipat Vernekel
- 18. 2 (dua) Buah Handycam
- 19. 50 (lima puluh) Buah Kursi Rapat Plastik
- 20. 10 (sepuluh) Unit Balai Penyuluhan
- 21. 21 (dua puluh satu) Buah Whiteboard
- 22. 14 (empat belas) Unit Rak Arsip
- 23. 7 (tujuh) Paket GenRe KIT
- 24. 20 (dua puluh) Unit Laptop Lenovo
- 25. 15 (lima belas) Lemari Penyimpan Alkon
- 26. 2 (dua) buah Meja Kerja Pejabat
- 27. 3 (tiga) buah Set Sofa
- 28. 86 (delapan puluh enam) buah gordas
- 29. 2 (dua) paket Instalasi Air Bersih
- 30. 1 (satu) Gedung Gudang Alkon
- 31. 1 (satu) Buah Brankas

8. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Masih terbatasnya SDM Aparatur pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana baik secara Kuantitas maupun Kualitas.
- 2) Kurangnya Tenaga Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) sebagai ujung tombak keberhasilan pencapaian target Akseptor KB untuk Kabupaten Rote Ndao.
- 3) Masih lemahnya koordinasi antar instansi terkait (stakeholder) dalam pelaksanaan pembangunan

khususnya di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian kegiatan.

- 4) Masih terdapat sejumlah Jabatan Struktural Eselon IVa yang kosong
- 5) Masih terbatasnya dana dalam mendukung dan mensukseskan program dan kegiatan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- 6) Khusus Kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Pemerintah Pusat terlambat dalam menetapkan Petunjuk Teknis (Juknis) sehingga terdapat Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan schedule time yang telah ditetapkan.

b. Solusi

- 1) Memaksimalkan semua potensi sarana dan prasarana yang ada dan meningkatkan kapasitas SDM Aparatur baik melalui Bimbingan Teknis di semua bidang pekerjaan serta Bimbingan Teknis Lainnya yang berhubungan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana demi suksesnya pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.
- 2) Meningkatkan evaluasi kinerja Tenaga Penyuluh Lapangan KB baik itu PNS maupun Tenaga Kontrak sehingga pelayanan disetiap Kecamatan/Kelurahan/Desa lebih maksimal.
- 3) Khusus Program Kegiatan yang bersumber dari Dana DAK maka dibutuhkan koordinasi yang lebih komprehensif antara Pemerintah Daerah Maupun Pemerintah Pusat sehingga pendistribusian Dana maupun Program Kegiatan DAK tercapai secara maksimal.

- 4) Meningkatkan komunikasi dan koordinasi serta kerjasama yang baik dengan instansi terkait dalam rangka tercapainya program dan kegiatan pembangunan.

Ba'a, 24 Januari 2025
Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
Kabupaten Rote Ndao,



Regina A. V. Nedoh, S.STP,M.Si
Pembina

NIP. 19800827 199912 2 003